

## Pemanfaatan Media Sosial Dalam Komunikasi Politik: Propaganda Isu Sistem Pemilu Proporsional

### *Usage of Social Media in Political Communication: Propaganda for Proportional Election System Issues*

M. Yusuf Samad<sup>1</sup>, Ferdi Hilman<sup>2</sup>, Andi Yakub<sup>3</sup>, Imam Ali Yoda<sup>4</sup>, Ongku Sutan Harahap<sup>5</sup>

<sup>1,3</sup> Universitas Hasanuddin, <sup>2</sup> Kontinum Consulting, <sup>4,5</sup> STIN

<sup>1</sup> [smy23e@student.unhas.ac.id](mailto:smy23e@student.unhas.ac.id)

Naskah diterima: 19 September 2023, direvisi: 23 Oktober 2023, disetujui: 29 Desember 2023

#### **Abstract**

*The polemic on the proportional election system ahead of the election continues to emerge. Approaching the 2024 elections, this polemic has re-emerged and has been spearheaded by political actors as political communicators. These communicators use their social media as a forum for conveying propaganda regarding the proportional election system. This study aims to analyze the political communication of political actors involved in the polemic on the issue of a proportional election system ahead of the 2024 Election and how propaganda techniques on social media are related to this issue. This study was conducted to explore patterns of political communication related to the proportional election system delivered on Twitter. This study applies qualitative content analysis or Qualitative Content Analysis (QCA). The study results show that political communicators use social media Twitter to carry out propaganda about the proportional electoral system by using the Testimonial propaganda technique, Card-stacking Frustration, or Scapegoat.*

**Keywords:** Political Communication, Social Media, Propaganda, Electoral System.

#### **Abstrak**

*Polemik sistem pemilu proporsional jelang pelaksanaan pemilu terus bermunculan. Mendekati pemilu 2024, polemik tersebut kembali muncul dan dipelopori oleh aktor-aktor politik sebagai komunikator politik, para komunikator itu menggunakan media sosialnya sebagai wadah untuk menyampaikan propaganda terkait sistem pemilu proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi politik aktor politik yang terlibat dalam polemik isu sistem pemilu proporsional jelang Pemilu 2024 dan bagaimana teknik propaganda di media sosial terkait isu tersebut. Studi ini dilakukan untuk mengeksplorasi pola komunikasi politik terkait sistem pemilu proporsional yang disampaikan di Twitter. Penelitian ini menerapkan analisis konten kualitatif atau Qualitative Content Analysis (QCA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikator politik menggunakan media sosial Twitter untuk melakukan propaganda tentang sistem pemilu proporsional dengan menggunakan Teknik propaganda Testimonial, Card-stacking Frustration or Scapegoat.*

**Kata kunci:** Komunikasi Politik, Media Sosial, Propaganda, Sistem Pemilu.

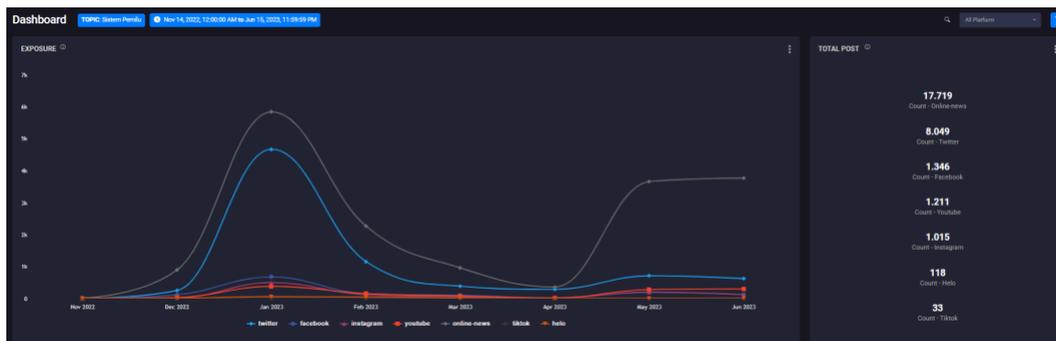
## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana bagi bangsa dan negara untuk menjalankan demokrasi (Effendi 2017). Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi secara serentak pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, tahapan pemilu diawali dengan perencanaan program dan anggaran mulai 14 Juni 2022 hingga 14 Juni 2024, tahapan pemilu kemudian diakhiri dengan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan menang berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Dalam tahapan tersebut, berbagai isu-isu Pemilu 2024 telah muncul, seperti hoaks dan ujaran kebencian (Diniyanto and Sutrisno 2022), penundaan Pemilu (Fitriana and Budyatmono 2022), politik identitas (Hasanudin, Samad, and Maya 2023), penyalahgunaan kekuasaan (Azli, Zarkasih, and Pujiyanto 2023), pencalonan presiden pada Pemilu 2024 (Pramuji et al. 2023), dan sistem Pemilu proporsional (Pakaya, Katili, and Latuda 2022).

Isu tentang sistem Pemilu proporsional kembali muncul di tahun 2023 dan isu ini bukan pertama kali mencuat jelang pelaksanaan Pemilu. Menurut Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Dr. Sri Budi Eko Wardani, sejak Pemilu pertama tahun 1955 sampai saat ini, pelaksanaan pemilu menganut sistem Pemilu proporsional. Hal ini dikarenakan keragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia yang kecenderungannya memiliki banyak partai sehingga sistem proporsional dianggap tepat. Secara rinci, penerapan sistem pemilu proporsional di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu proporsional tertutup pada tahun 1955-1999, proporsional terbuka terbatas (berdasarkan nomor urut) pada tahun 2004 dan proporsional terbuka (berdasarkan suara terbanyak) pada tahun 2009-2019 (Kherid 2021). Pada dasarnya pro dan kontra terkait sistem Pemilu pernah juga terjadi sebelumnya yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu, seperti tahun 2017 lalu, terdapat kelompok yang pro sistem proporsional tertutup dan ada juga yang pro sistem proporsional terbuka (Wijayanti 2023).

Jelang pemilu 2024, polemik sistem Pemilu terjadi pada tahun 2022, sebanyak enam orang yang terdiri dari dua kader partai dan empat perseorangan warga negara mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Gugatan tersebut diajukan pada 14 November 2022 dengan harapan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. MK kemudian menggelar sidang perdana pada 23 November 2022 kemudian sidang terus digelar hingga sidang ke-16 pada 23 Mei 2023 (Saputra 2023).

Pro dan kontra terkait sistem pemilu proporsional dapat dilihat di media sosial khususnya Twitter atau saat ini dikenal dengan media sosial X. Hal ini dikarenakan banyaknya unggahan tentang sistem pemilu proporsional di media sosial tersebut. Berdasarkan analisis media sosial menggunakan aplikasi Indigo dengan rentang waktu 14 November 2022 s.d. 15 Juni 2023, Twitter (X) adalah media sosial yang paling banyak mengunggah tentang sistem proporsional dengan jumlah sebanyak 8.049 unggahan, kemudian Facebook sebanyak 1.346 unggahan, dan lain-lain. Data tersebut diperoleh dari hasil analisis aplikasi Indigo dengan pengaturan tertentu, yaitu menggunakan kueri "sistem proporsional". Alasan penulis menggunakan rentang waktu tersebut yaitu 14 November 2022 adalah pertama kali gugatan terhadap sistem pemilu dan 15 Juni 2023 adalah waktu pembacaan putusan MK tentang hasil gugatan tersebut.



Gambar 1. Media sosial paling banyak unggah tentang sistem proporsional (Hasil analisis aplikasi Indigo, diakses pada 7 Juli 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi politik aktor politik yang terlibat dalam polemik isu sistem pemilu proporsional jelang Pemilu 2024 dan bagaimana teknik propaganda di media sosial terkait isu tersebut. Dalam menganalisis data yang ada, penulis menggunakan teori komunikasi politik yang digagas oleh McNair (2017). Komunikasi politik didefinisikan sebagai tindakan komunikasi terkait politik untuk misi atau tujuan tertentu. Menurut McNair (2017), terdapat tiga tindakan yang dikelompokkan dalam komunikasi politik. Pertama, segala bentuk komunikasi politisi dan para aktor politik lain untuk mencapai misi tertentu. Kedua, komunikasi politik berupa liputan editorial, pemberitaan, dan diskusi politik baik berupa tulisan di kolom komentar media sosial maupun di blog yang membahas tentang kegiatan dan profil para aktor politik. Ketiga, komunikasi oleh para aktivis dan pemilih yang ditujukan kepada para aktor-aktor politik dan politisi tertentu (McNair 2017). Komunikasi politik juga dapat dibangun melalui pengelolaan konten media situs web (*website*) yang berkolaborasi dengan media sosial (Setianto 2013).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Propaganda menurut Heryanto (2018). Propaganda memiliki berbagai teknik yang harus mampu dikuasai propagandis agar mampu mempengaruhi masyarakat dalam merubah persepsinya dan nantinya akan berpengaruh pada manipulasi perasaan target propaganda. Teknik teknik propaganda terdiri dari (1) *Name Calling*, teknik ini dengan cara memberikan label yang buruk dengan tujuan agar orang – orang menolak dan mengasingkan tanpa diperiksa terlebih dahulu. (2) *Glittering Generalities*, teknik ini mengasosiasikan sesuatu dengan kata bijak yang digunakan untuk membuat kita menerima dan menyetujui sesuatu tanpa diperiksa terlebih dahulu. Teknik ini digunakan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat agar mau mendukung gagasan propagandis. (3) *Transfer*, teknik ini memanfaatkan tokoh atau pihak yang memiliki kekuasaan sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi bawahannya untuk mengikuti perkataan orang yang berkuasa atau memimpin tersebut. (4) *Testimonial*, teknik ini berisi perkataan baik dan buruk atas suatu program, gagasan, produk yang biasa digunakan dalam kegiatan politik. (5) *Card-stacking*, teknik yang menonjolkan hal-hal yang baik saja sehingga mampu mempengaruhi publik untuk percaya hanya pada satu sisi yang diperlihatkan saja. (6) *Frustration or Scapegoat*, teknik yang memadukan tiga teknik propaganda berupa *Name Calling*, *Glittering Generaties* dan *Card-stacking* yang biasanya digunakan pada masa kampanye untuk menyalurkan kebencian dengan menciptakan kambing hitam (Heryanto 2018). Dalam konteks propaganda, terdapat istilah propaganda politik. Propaganda politik melalui media baru atau *New Media* cukup efektif jika dibandingkan dengan media konvensional karena pesan propaganda yang dibuat berupa gambar dan narasi yang menarik perhatian para pembaca sehingga pembaca hanya membutuhkan waktu singkat untuk membaca atau mendefinisikan pesan yang ada disampaikan pada media baru (Tahir, Kusmanto,

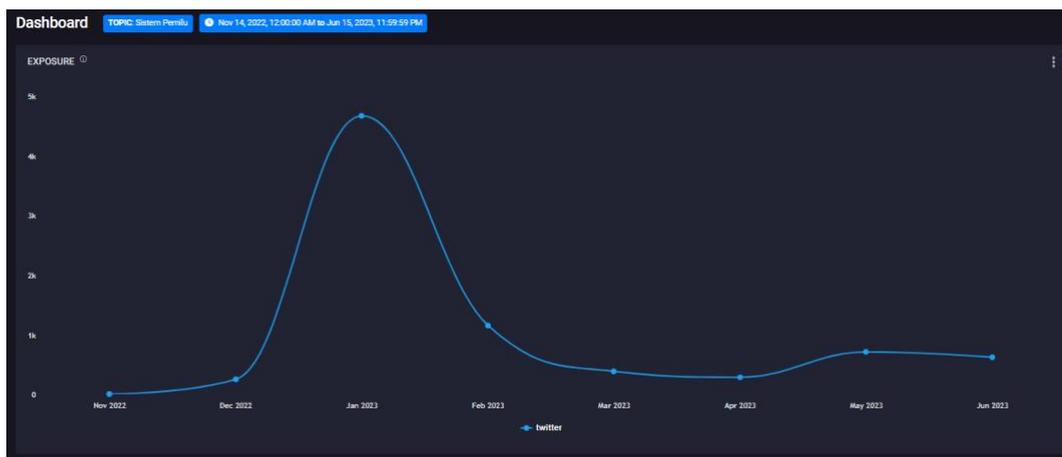
and Amin 2020). Propaganda politik ini telah digunakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, yakni kandidat Presiden & Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin (Barata and Simanjuntak 2019).

## METODE

Studi ini dilakukan untuk mengeksplorasi pola komunikasi politik terkait sistem pemilu proporsional yang disampaikan di Twitter (X). Penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten atau disebut juga dengan *Qualitative Content Analysis* (QCA). QCA adalah metode untuk menggambarkan secara sistematis makna dari subjek penelitian kualitatif. Sebagai metode penelitian, ini merupakan cara sistematis dan obyektif untuk menggambarkan dan mengukur fenomena. Artinya, basis metode penelitian ini pada dasarnya adalah analisis isi yang mengulas mendalam fenomena yang terjadi. QCA mengharuskan penulis memfokuskan analisis pada aspek-aspek tertentu dari yang diteliti, seperti yang ditunjukkan oleh pertanyaan penelitian (Schreier 2012). Dalam konteks penelitian ini, aspek yang dimaksud adalah komunikasi aktor politik dan propaganda di media sosial.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Analisis konten adalah sebuah teknik penelitian untuk menyimpulkan makna teks ataupun melalui prosedur yang dapat dipercaya (*reliable*), dapat direplikabel atau diaplikasikan dalam konteks yang berbeda (*replicable*), serta sah (Krippendorff 2004). Sebagai metode penelitian, jenis penelitian ini merupakan cara sistematis dan obyektif untuk menggambarkan dan mengukur fenomena. Komunikator politik yang diteliti dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki *engagements* tertinggi pada unggahannya, baik itu individu maupun kelompok atau lembaga. Peneliti tidak menentukan secara langsung apakah individu atau kelompok/lembaga yang diteliti, tetapi penentuan itu dilakukan berdasarkan hasil analisis dari aplikasi yang digunakan (Indigo). *Engagements* adalah frekuensi total pengguna berinteraksi dengan Tweet, termasuk *retweet*, balasan, ikuti, suka, tautan, kartu, tagar, media tersemat, nama pengguna, foto profil, atau perluasan Tweet (Twitter n.d.). Semakin banyak jumlah suka, balasan, dan view yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat *engagement* pengikut terhadap konten yang diunggah (Budiarsa and Pandiangan 2022).

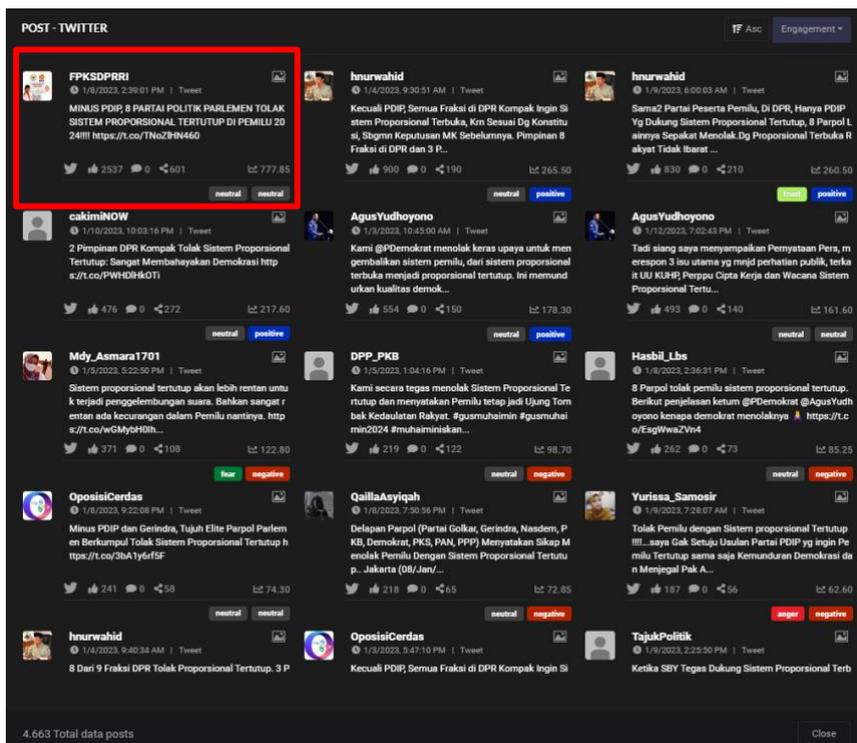
Pada kurun waktu sejak gugatan diajukan ke MK hingga putusan MK, isu terkait sistem proporsional mengalami peningkatan pada Bulan Januari dan Bulan Mei 2023. Untuk itu, tulisan ini meneliti unggahan para komunikator politik yang memiliki *engagements* tertinggi di kedua bulan tersebut. Data dibawah ini diperoleh dari hasil analisis aplikasi Indigo dengan pengaturan tertentu, yaitu menggunakan kueri "sistem proporsional", penulis hanya menggunakan kueri tersebut pada penelitian ini.



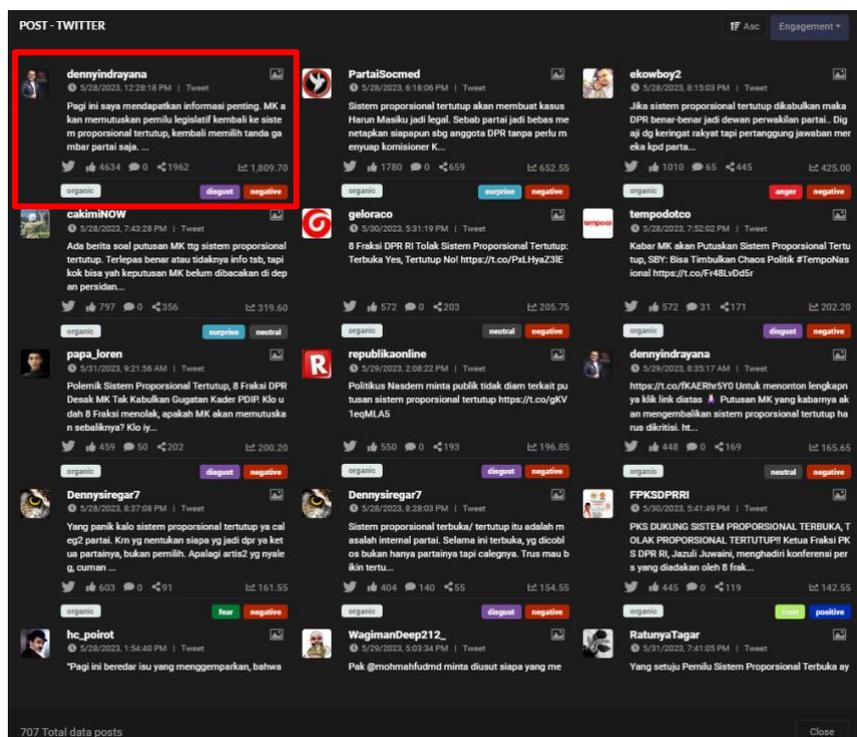
Gambar 2. Dinamika isu sistem proporsional pada 14 November 2022 s.d. 15 Juni 2023 (Hasil analisis aplikasi Indigo, diakses pada 7 Juli 2023)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil monitoring pada Bulan Januari menunjukkan bahwa dari sebanyak 4.663 unggahan, akun Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) memiliki *engagements* tertinggi dengan jumlah 777,85 sesuai dengan **gambar 3**, kemudian pada bulan Mei, akun Denny Indrayana (@dennyindrayana) memiliki *engagements* tertinggi dengan jumlah 1.809,70 sesuai dengan **gambar 4**. Angka *engagements* 777,85 dan 1.809,70 dari diperoleh dari frekuensi total pengguna media sosial Twitter (X) berinteraksi dengan Tweet masing-masing akun (@FPKSDPRRI dan @dennyindrayana). Interaksi yang dilakukan dapat berupa *retweet*, balasan, ikuti, suka, tautan, tagar, media tersemat, nama pengguna, foto profil, dan lainnya. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan entitas yang berbeda karena satunya ada personal dan satu lagi ada nonpersonal atau lembaga. Pada dasarnya, hal tersebut tidak mengapa karena penelitian ini tidak membandingkan antarkeduanya, peneliti hanya menganalisis komunikasi politik kedua aktor tersebut dalam melakukan propaganda isu tentang sistem pemilu proporsional. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa komunikasi politik dan propaganda yang dilakukan oleh individu dan kelompok dalam konteks polemik isu sistem pemilu proporsional jelang Pemilu 2024.



Gambar 3. Akun-akun yang menggunggah isu sistem proporsional pada Januari 2023 (Hasil analisis aplikasi Indigo, diakses pada 7 Juli 2023)



Gambar 4. Akun-akun yang menggunggah isu sistem proporsional pada Mei 2023 (Hasil analisis aplikasi Indigo, diakses pada 7 Juli 2023)

### Akun Fraksi PKS DPR RI (@FKSDPRRI)

Akun Twitter (X) @FKSDPRRI mulai bergabung sejak November 2009 dan berlokasi di

Jakarta, Indonesia. Akun ini mempunyai sebanyak 222.030 pengikut dan mengikuti sebanyak 86 akun Twitter. Adapun jumlah unggahan akun tersebut hingga 17 Oktober 2023 sebanyak 54,931 ribu unggahan, 14.963 foto dan video serta 11.110 *likes*. Akun ini juga menyajikan informasi yang dapat dihubungi seperti surat elektronik [humas@fraksi.pks.id](mailto:humas@fraksi.pks.id) dan nomor telepon yang dapat dihubungi 021-5723620. Adapun foto profil dan foto *header* atau dikenal dengan *banner* pada akun ini memuat foto Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa.



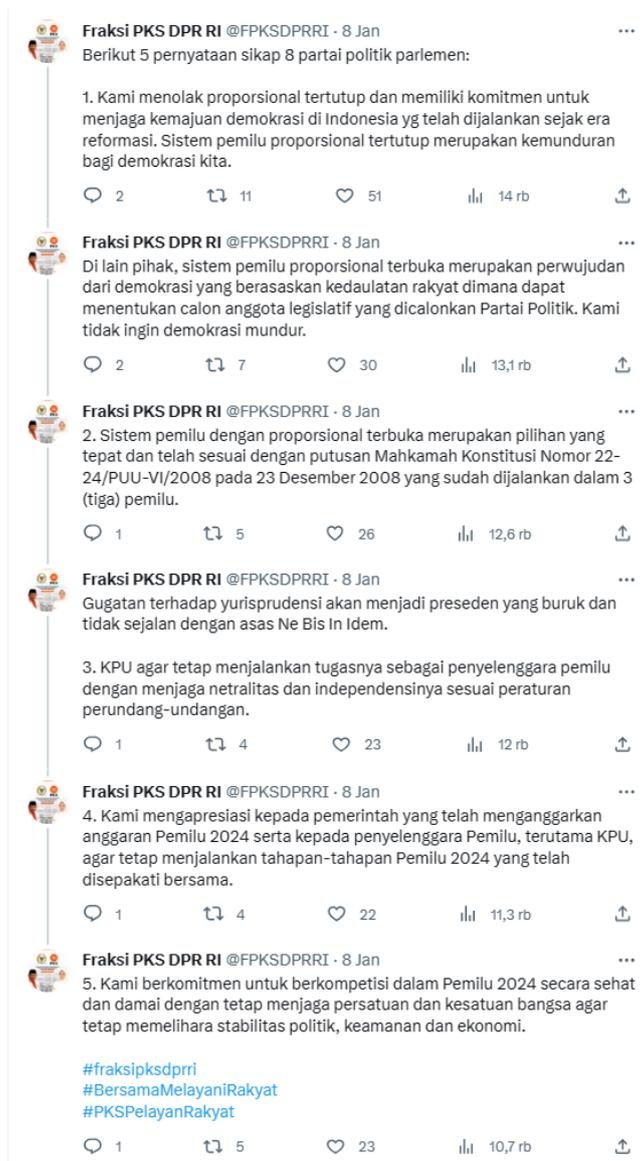
Gambar 5. Profil akun @FPKSDPRRI (<https://twitter.com/FPKSDPRRI>, diakses pada 17 Oktober 2023)

Unggahan pada akun ini yang memiliki *engagement* yang tinggi terkait dengan penolakan sejumlah partai politik parlemen terhadap sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Banyaknya *engagement* dikarenakan pengguna media sosial lebih banyak mendukung pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka, termasuk diantaranya para kader partai pendukung dan simpatisan partai. Unggahan tersebut ditulis pada 8 Januari 2023 dengan menggunggah 5 pernyataan sikap pernyataan sikap 8 partai politik parlemen yang disertai dengan foto para tokoh partai politik tersebut, diantaranya Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikh.



Gambar 6. Unggahan akun @FPKSDPRRI tentang penolakan partai politik parlemen pada sistem proporsional tertutup (<https://twitter.com/FPKSDPRRI/status/1611990844613218306>, diakses pada 2 Agustus 2023)

Adapun pernyataan sikap yang diunggah secara bersamaan dengan foto diatas, sebagai berikut:



Gambar 7. Unggahan akun @FPKSDPRRI tentang pernyataan sikap partai politik terkait sistem proporsional tertutup. Fraksi PKS dan sejumlah partai lainnya telah mengeluarkan pernyataan sikap ini pasca adanya gugatan yang menginginkan sistem proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu 2024 (<https://twitter.com/FPKSDPRRI/status/1611990844613218306>, diakses pada 2 Agustus 2023)

Komunikasi politik yang dilakukan oleh akun Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) dapat digolongkan pada tindakan pertama menurut McNair (2017), yaitu berbagai variasi komunikasi politisi dan para aktor politik lain untuk mencapai misi tertentu berupa mengangkat isu sistem pemilu proporsional. Akun Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) termasuk dalam aktor politik lain yang melakukan komunikasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud dalam unggahan akun Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) adalah menyampaikan pernyataan sikap sejumlah partai politik terkait sistem pemilu proporsional.

Jika merujuk pada teknik propaganda Heryanto (2018), maka teknik propaganda yang digunakan oleh akun Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) adalah teknik *testimonial*, hal ini dibuktikan dengan pernyataan baik tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan pernyataan buruk

tentang sistem pemilu proporsional tertutup. Selain itu teknik lain yang digunakan oleh akun Fraksi PKS DPR RI (@FKSDPRRI) adalah *Card-stacking* dengan cara hanya menjelaskan keuntungan sistem pemilu proporsional terbuka tanpa menjelaskan kerugiannya, begitu juga sebaliknya pada sistem pemilu proporsional tertutup. Padahal, kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan yang dijelaskan pada tulisan Kherid (2021) pada table 1, misalnya salah satu cuitan akun @FKSDPRRI membahas tentang sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi. Namun, akun tersebut tidak menyampaikan kelebihan berupa penguatan tanggung jawab parpol, kemudahan menilai parpol, hingga menekan korupsi dan politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa akun tersebut fokus menonjolkan pada keuntungan sistem pemilu proporsional terbuka saja sesuai dengan kepentingannya yang mendukung sistem pemilu proporsional terbuka.

Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan sistem pemilu terbuka dan tertutup

Proporsional Terbuka	
Kelebihan	Kekurangan
Legitimasi kuat calon lebih dekat pemilih	Biaya politik tinggi, korupsi kolusi sistematis
Menghapus nepotisme	Kontestasi politik jadi liar dan liberal
Legitimasi kuat	Tidak ada standar kualifikasi pencalonan
Menguatkan sistem perwakilan DPR	Parpol minim gagasan, terjadi deparpolisasi
Proporsional Tertutup	
Kelebihan	Kekurangan
Menekan politik uang dan korupsi politik	Mengandalkan nepotisme dan oligarki
Parpol sebagai kekuatan gagasan	Tidak ada kedekatan calon dengan pemilih
Menguatkan tanggung jawab parpol	Calon kurang aspiratif
Mudah menilai kinerja parpol	Pendidikan politik berkurang

Sumber: (Kherid, 2021)

### Akun Denny Indrayana (@dennyindrayana)

Akun ini mulai bergabung di Twitter sejak Maret 2010 dengan pengikut sebanyak 615.139 dan mengikuti sebanyak 43 akun Twitter. Adapun jumlah unggahan akun tersebut hingga 2 Agustus 2023 sebanyak 17,7 ribu unggahan. Pemilik akun ini merupakan akademisi dan pengacara. Denny Indrayana sekaligus politikus yang berasal dari Partai Demokrat dan saat ini telah mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Daerah Pemilihan (II) Kalimantan Selatan pada Pemilu 2024 (Briantika 2023).



Gambar 8. Profil akun @dennyindrayana

(Sumber: <https://twitter.com/dennyindrayana>, diakses pada 2 Agustus 2023)

Konten yang diunggah pada akun tersebut menarasikan tentang rencana MK untuk memutuskan Pemilu legislatif menggunakan sistem Pemilu proporsional tertutup. Konten tersebut diunggah pada 28 Mei 2023 dengan total *engagement* sebanyak 1.809,70. Konten tersebut berupa utas yang menjelaskan sebuah kronologi tentang informasi yang telah diterima kemudian menyampaikan tentang mafia peradilan di Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persetujuan Partai Demokrat dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Akun tersebut juga menyampaikan dalam utasnya terkait adanya upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.



Gambar 9. Unggahan akun @dennyindrayana tentang rencana MK putusan sistem Pemilu proporsional tertutup pada Pemilu 2024. (<https://twitter.com/dennyindrayana/status/1662692250554609664>, diakses pada 3 Agustus 2023)

Komunikasi politik akun Denny Indrayana (@dennyindrayana) memiliki kesamaan dengan akun Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI), yaitu kesamaan dalam tindakan pertama komunikasi politik menurut pandangan pandangan McNair (2017), yaitu semua bentuk komunikasi politisi dan para aktor politik lain untuk mencapai misi tertentu. Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam mencapai tujuannya. Jika akun Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) bertujuan menyampaikan pernyataan sejumlah partai politik terkait sistem pemilu proporsional, maka akun Denny Indrayana (@dennyindrayana) bertujuan untuk menyampaikan rencana putusan MK tentang sistem pemilu proporsional, perpanjangan masa jabatan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), permasalahan antara Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan Partai Demokrat, hingga pencapresan Anies Baswedan.

Teknik propaganda yang dilakukan oleh akun Denny Indrayana (@dennyindrayana) adalah *Frustration or Scapegoat* dengan cara menggunakan kata bijak seperti ‘ikhtiar berjuang’, pemberian label buruk seperti “dicopet” dan menonjolkan keburukan sistem pemilu proporsional tertutup tanpa menyampaikan kelebihan sistem tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan teknik propaganda antara aktor individu dan aktor lembaga. Akun Denny Indrayana (@dennyindrayana) menggunakan satu teknik propaganda dan akun Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) menggunakan teknik propaganda yang bervariasi. Perbedaan ini dimungkinkan karena perbedaan tujuan propaganda, akun Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) hanya memiliki satu tujuan propaganda pada unggahannya sedangkan akun Denny Indrayana (@dennyindrayana) memiliki beberapa tujuan propaganda pada unggahannya atau tidak membahas satu topik saja.

## KESIMPULAN

Komunikator politik pada penelitian ini terdiri dari perorangan dan lembaga berupa partai politik. Kedua komunikator politik tersebut termasuk dalam tindakan pertama pada komunikasi politik yang diusungkan oleh McNair (2017). Keduanya dapat dikelompokkan sebagai oposisi pemerintah. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian tentang komunikasi politik para aktor politik baik lembaga maupun perorangan yang menggunakan media sosial (Budiarsa and Pandiangan 2022). Di sisi lain, temuan ini berseberangan dengan temuan tentang model komunikasi politik yang menggunakan situs web (Setianto 2013) karena komunikasi politik kedua aktor tersebut fokus pada penggunaan media sosial saja. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politisi (@dennyindrayana) dan aktor politik lainnya (@FPKSDPRRI) dilakukan untuk mencapai misi tertentu, dalam konteks penelitian ini adalah propaganda tentang sistem pemilu proporsional terbuka di media sosial Twitter (X).

Teknik propaganda yang dilakukan kedua komunikator politik tersebut memiliki perbedaan bergantung pada fokus dan tujuan propaganda tersebut. Fokus propaganda hanya berkaitan dengan sikap partai politik tentang sistem pemilu proporsional dengan menggunakan teknik propaganda *Testimonial* dan *Card-stacking*, sedangkan akun Denny Indrayana (@dennyindrayana) memiliki tujuan yang beragam atau tidak hanya terkait dengan sistem pemilu proporsional dengan menggunakan teknik propaganda *Frustration or Scapegoat*.

Penelitian ini berkontribusi pada riset-riset yang menggunakan data dari media sosial Twitter (X). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa data pada Twitter (X) tidak hanya dapat digunakan untuk meneliti tentang propaganda isu separatist (Samad and Indrajit 2022) dan propaganda isu COVID-19 (Samad and Azzahra 2022), tetapi juga Twitter (X) dapat digunakan untuk meneliti propaganda yang berkaitan dengan isu-isu politik. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah melakukan kontra propaganda dan meningkatkan literasi politik masyarakat melalui media sosial. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen yang baik membuat pemerintah optimal untuk mencapai tujuannya melalui pemanfaatan media sosial (Goeritman 2021). Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah penelitian yang membandingkan data pada media sosial dan media online untuk mengetahui korelasi keduanya terhadap isu-isu politik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada sejumlah lembaga konsultan seperti Kontinum Consulting dan lembaga pendidikan seperti Universitas Hasanuddin dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, yang telah berkolaborasi dalam menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih juga kepada pengelola jurnal dan para *reviewer* yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkontribusi pada Jurnal IPTEK-KOM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azli, Adrian, Achmad Zarkasih, and Pujiyanto. 2023. "Antisipasi Penyalahgunaan Kekuasaan Melalui Pengawasan Netralitas Penyelenggara Negara Guna Menghasilkan Pemilu Yang Jujur Dan Adil." *Jurnal Penelitian & Kajian Intelijen* 4 (1).
- Barata, Mariam Fatima, and Melvin Bonardo Simanjuntak. 2019. "STRATEGI PUBLISITAS & PROPAGANDA POLITIK (Studi Pada Kandidat Presiden & Wakil Presiden, Jokowi-KH. Ma'ruf Amin)." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 23 (2): 135. <https://doi.org/10.31445/jskm.2019.2061>.
- Briantika, Adi. 2023. "Denny Indrayana Jadi Caleg Demokrat Dan Dukung Anies Baswedan." *Tirto*, 2023. <https://tirto.id/denny-indrayana-jadi-caleg-demokrat-dan-dukung-anies-baswedan-gLFD>.
- Budiarsa, Yohanes Thianika, and Andreas Pandiangan. 2022. "Komunikasi Politik Di Masa Pandemi: Analisis Isi Unggahan Instagram Mengenai Program Pengendalian Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 26 (2): 123–38. <https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4865>.
- Diniyanto, Ayon, and Wahyudi Sutrisno. 2022. "Pengawasan Pemilihan Umum Di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, Dan Strategi." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5 (1): 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>.
- Effendi, Agus. 2017. "Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2): 295–316. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.746>.
- Fitriana, Rosita Tryas, and Winarno Budyatmono. 2022. "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1 (2). <https://youtu.be/0MwryVHd5KE>.
- Goeritman, Happy Indah Nurlita. 2021. "Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Media Sosial Crisis Communication of Indonesia Government During Pandemic Covid-19 Using Social Media." *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)* 23 (1): 1–19. <http://dx.doi.org/10.33169/iptekkom.23.1.2021.1-19>.
- Hasanudin, Restu, M Yusuf Samad, and Heny Batara Maya. 2023. "Pendekatan Kolaboratif Terkait Pencegahan Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Lemhannas RI* 11 (2): 93–104.
- Heryanto, G G. 2018. *Media Komunikasi Politik: Bingkai Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Kherid, Muhammad Nizar. 2021. *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Krippendorff, K. 2004. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. London: Sage Publications.
- McNair, Brian. 2017. *AN INTRODUCTION TO POLITICAL COMMUNICATION, Third Edition. An Introduction to Political Communication, Third Edition*. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203699683>.
- Pakaya, Risan, Yusril Katili, and Firman Latuda. 2022. "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1 (2): 172–82. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>.
- Pramuji, Angger, M. Yusuf Samad, Tarwo Kusnarno, and Hediati Erry S. 2023. "Dinamika Pengguna Media

- Sosial Terkait Calon Presiden Pemilihan Umum 2024.” *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 18 (2): 108–16. <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/gemakampus/article/view/329/288>.
- Samad, M Yusuf, and Fatimah Azzahra. 2022. “Penerapan Propaganda Di Media Sosial Twitter Guna Menyebarkan Informasi Terkait Covid-19.” *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi* 2 (2): 119–28. <https://doi.org/10.29313/jrmk.v2i2.1634>.
- Samad, M Yusuf, and Richardus Eko Indrajit. 2022. “The Implementation of A Social Media Analytics Tool ‘Social Bearing’ to Comprehend Foreign Propaganda Related to Papuan Separatist Issues.” *Jurnal Pertahanan* 8 (1): 66–79.
- Saputra, Andi. 2023. “Kronologi Gugatan Sistem Pemilu Terbuka Hingga Vonis Hari Ini.” *Detik.Com*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6773548/kronologi-gugatan-sistem-pemilu-terbuka-hingga-vonis-hari-ini?>
- Schreier, Margrit. 2012. *Qualitative Content Analysis in Practice*. SAGE Publications. SAGE Publications Ltd.
- Setianto, Widodo Agus. 2013. “Model Pengelolaan Komunikasi Politik Di Media Online.” *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 15 (2): 103. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.15.2.2013.103-116>.
- Tahir, Rahman, Heri Kusmanto, and Muryanto Amin. 2020. “Propaganda Politik Hoaks Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019.” *Perspektif* 9 (2): 236–51. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3458>.
- Twitter. n.d. “About Your Activity Dashboard.” Accessed July 7, 2023. <https://help.twitter.com/id/managing-your-account/using-the-tweet-activity-dashboard>.
- Wijayanti, Sri Indah. 2023. “Apa Itu Sistem Proporsional Tertutup Dengan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu?” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, 2023. <https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-proporsional-terbuka-dalam-pemilu/>.